

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kebijakan pembangunan yang berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di negara-negara kontinen atau daratan, karena masing-masing pulau yang ada di negara ini memiliki karakteristik geografis tersendiri dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Selain keragaman geografis dan sumberdaya alam, masing-masing pulau didiami berbagai suku bangsa dan kelompok etnis yang menyebabkan bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Sekarang ini kelompok etnis mulai mengenal pendidikan modern tidak dalam waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan pengalaman intelektual dan kemampuan sumberdaya manusia berbeda-beda. Dengan memperhatikan negara kepulauan, keragaman budaya, sosial, pendidikan, dan ekonomi yang sangat tinggi, perubahan masyarakat, serta tuntutan keberlanjutan maka sistem perencanaan pembangunan yang ada saat ini yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis, dan tanggap terhadap perubahan zaman (Suzetta, 2007 : 3).

Sektor pertanian di Indonesia semakin dirasakan penting bagi bangsa Indonesia, karena sektor ini mampu memasok pangan sehingga Indonesia menjadi negara produsen padi dan mampu berswasembada padi sejak 1984. Disamping itu sektor pertanian juga mampu menyediakan lapangan kerja, menyumbangkan devisa melalui bertambahnya ekspor serta mampu mendukung munculnya industri berbahan baku pertanian. Sehingga nilai produk sektor pertanian terus bertambah (Soekartawi, 1995 : 2).

Pembangunan pertanian adalah salah satu bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan pada usaha pengembangan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Pembangunan disektor pertanian tidak hanya untuk memantapkan swasembada beras dan palawija tetapi juga meliputi usaha-usaha kegiatan produksi pangan yang berasal dari tanaman hortikultura, tanaman perkebunan,

peternakan dan perikanan. Peningkatan usaha tanaman hortikultura sangat mempengaruhi tingkat pendapatan dan taraf hidup petani, menunjang kegiatan pembangunan industri dan meningkatkan ekspor untuk cadangan devisa negara (Ambesa, 2006 : 5).

Sejak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 maka kedudukan koperasi sebagai prototipe badan usaha yang sesuai untuk bangsa Indonesia menjadi kuat. Dalam pelaksanaannya maka melalui Undang-Undang RI 25 tahun 1992 tentang perekonomian diatur segala seluk beluk mengenai kehidupan berkoperasi Indonesia. Yang pelaksanaan secara teknis ditangani oleh Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Pemerintah secara aktif turut serta dalam pembangunan nasional yang salah satunya adalah mendukung masyarakat dengan mendirikan koperasi. Upaya pembangunan koperasi terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait dilakukan secara insentif dan berkesinambungan dengan tetap memelihara kemurnian asas dan pelaksanaan koperasi. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap sendi, kegiatan koperasi selalu hadir dalam kehidupan ekonomi rakyat. Dalam kegiatan ekonomi nasional, koperasi merupakan badan yang berperan serta secara aktif membantu jalannya perkembangan pembangunan nasional. Terutama melalui Koperasi Unit Desa yang sedemikian merata tersebar. Ini sebuah potensi yang seharusnya terus digali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat (Nugroho, 1995 : 15).

Luas lahan pertanian yang ada di Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari luas panen padi sawah tahun 2011 sebesar 52.811 hektar yang luas panen terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo, sedangkan luas panen jagung sebesar 135.754 hektar yang luas panen terbesarnya di Kabupaten Pohuwato (BPS Provinsi Gorontalo, 2012 : 121).

Jumlah koperasi yang ada di Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebanyak 986 unit yang jumlah anggotanya 123.548 orang. Selain itu juga ada koperasi yang bergerak di bidang pertanian seperti KUD dan KOPERTA. Jumlah KUD yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 53 unit yang jumlah anggotanya sebanyak 22.283 orang. Perkembangan koperasi pada saat sangat fluktuatif karena dari sekian banyak koperasi yang ada tidak semuanya masih dalam keadaan aktif. KUD

banyak membantu petani-petani yang ada di Provinsi Gorontalo baik dalam hal penyediaan SAPRODI, simpan pinjam, penjualan, penyaluran serta pembelian bahan pangan yang dihasilkan para petani, sedangkan dalam tingkat pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan adanya ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana yang sangat menunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan (BPS Provinsi Gorontalo 2012 : 240-244).

Kabupaten Bone Bolango merupakan Kabupaten yang memiliki luas sebesar 15,21 % dari luas Provinsi Gorontalo, memiliki 17 Kecamatan, 160 Desa dan 5 Kelurahan. Tingkat pendidikan di Kabupaten Bone Bolango mengalami peningkatan, sedangkan perkembangan koperasi yang ada di Kecamatan Bone Bolango juga mengalami peningkatan baik dalam jumlah koperasi maupun jumlah anggotanya, jumlah koperasi yang aktif tahun 2011 sebanyak 110 yang jumlah anggotanya 15.941 orang. Di Kecamatan Tapa hanya ada satu Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu KUD “USRA” Tapa. Status sosial ekonomi di Kecamatan Tapa berbeda-beda karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Tapa hanya memiliki pendidikan rendah sehingga mempengaruhi pekerjaan yang mereka miliki serta pendapatan yang mereka hasilkan. Terutama pendidikan yang dimiliki oleh petani masih tergolong rendah (BPS Kabupaten Bone Bolango, 2012: 3-5).

KUD “USRA” Tapa merupakan salah satu KUD yang ada di Kecamatan Tapa yang berdiri sejak 36 tahun yang lalu, seberapa besar partisipasi yang diberikan masyarakat Kecamatan Tapa sebagai anggota dalam memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi KUD “USRA” ini, apakah partisipasi anggota khususnya petani sangat mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan KUD ini. Partisipasi yang diberikan dapat berupa pengadaan pangan, saprodi, simpanan pokok, modal sendiri ataupun simpan pinjam, hal tersebut dapat dilihat pada tujuh usaha yang dimiliki oleh KUD antara lain ; 1). Unit usaha simpan-pinjam, 2). Unit usaha sarana produksi, 3). Unit usaha rice milling unit (RMU), 4). Unit usaha pangan, 5). Unit usaha agropolitan, dan 6). Unit Waserda, 7). Unit Usaha Kuliner. Anggota penuh KUD “USRA” Tapa tahun 2012 sebanyak 544 orang (KUD “USRA” Tapa, 2013 : 10).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain ;

1. Bagaimana bentuk dan peran Koperasi Unit Desa “USRA” Tapa dalam pemberdayaan anggota koperasi.
2. Bagaimana partisipasi petani dalam Koperasi Unit Desa “USRA” Tapa yang ada di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ;

1. Bentuk dan peran Koperasi Unit Desa “USRA” Tapa dalam pemberdayaan Anggota koperasi.
2. Partisipasi petani pada Koperasi Unit Desa “USRA” Tapa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut ;

1. Bagi Koperasi Unit Desa “USRA” TAPA agar menjadi lebih meningkatkan kinerja Koperasi Unit Desa sebagai badan usaha perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat pada umumnya.
2. Bagi mahasiswa dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan serta dapat diaplikasikan kepada masyarakat umum.
3. Bagi pemerintah agar kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan agar lebih berpartisipasi dalam usaha pengembangan Koperasi Unit Desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat desa dan petani.